

Money Politik pada Kepemiluan di Kota Bengkulu (Studi Kasus RT 23, Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)

Zacky Antoni¹, Martandho², Intan Roudhotul Ilmi³, Tanu Wijaya⁴, Puspita Sari⁵

¹UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia. E-mail: zacky.antoni@mail.uinfasbengkulu.ac.id

²UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia. E-mail: kartandokarta@gmail.com

³UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia. E-mail: intanroudhotulilmi5@gmail.com

⁴UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia. E-mail: tanuw6905@gmail.com

⁵UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia. E-mail: puspitasari4064@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of money politics in the implementation of local elections, especially in RT 23, Dusun Besar Village, Bengkulu City. Through a qualitative approach with a case study method, this study reveals the forms of money politics practices that occur, the actors involved, and the factors that encourage these practices. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the practice of money politics is still taking place systematically and structured, especially approaching the voting day. Community economic factors, weak election supervision, and low political literacy are the main causes of the continuation of this practice. Money politics has a negative impact on the quality of local democracy, including in terms of unhealthy political participation and the election of candidates based on financial strength, not competence. This study recommends strengthening political education and stricter supervision by election organizers and supervisors.

Keywords: money politics; elections; Bengkulu City; local democracy; political participation; case study;

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam praktiknya, pemilu di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya praktik politik uang (money politics). Politik uang menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu karena dapat merusak asas keadilan, mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat, dan melanggar kekuasaan berdasarkan kekuatan finansial, bukan kapasitas dan integritas.

Kota Bengkulu sebagai bagian dari sistem demokrasi nasional tidak luput dari persoalan ini. Dalam beberapa pemilu terakhir, indikasi terjadinya politik uang semakin menguat, terutama di wilayah-wilayah permukiman padat penduduk dengan kondisi sosial ekonomi yang relatif rendah. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan dalam konteks ini adalah RT 23, Kelurahan Dusun Besar, yang menunjukkan pola praktik politik uang yang sistematis, terutama menjelang masa pemilihan.

Fenomena ini penting untuk diteliti lebih dalam karena dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana politik uang beroperasi di tingkat mikro, serta apa saja faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak praktik tersebut terhadap kualitas demokrasi lokal dan perilaku pemilih. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi terhadap wacana akademik mengenai demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya dalam memahami tantangan dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Dengan mengkaji praktik politik uang di RT 23, Kelurahan Dusun Besar, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penyelenggara pemilu, pengawas, serta masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran politik dan memperkuat kontrol sosial terhadap praktik-praktik politik yang merusak demokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik politik uang dalam proses pemilu di wilayah RT 23, Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual dan mendalam, serta memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena politik uang dari berbagai perspektif masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pemilihan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemahaman makna, pola interaksi sosial, dan proses yang terjadi dalam praktik politik uang. Metode studi kasus digunakan karena objek yang diteliti adalah spesifik, yaitu satu lingkungan RT yang menjadi lokasi dugaan maraknya politik uang dalam pemilu.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian adalah RT 23, Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive karena wilayah tersebut dikenal aktif dalam pemilu, namun juga rentan terhadap praktik politik uang. Subjek penelitian terdiri dari:

- a. Warga masyarakat RT 23 (pemilih)
- b. Tokoh masyarakat setempat
- c. Perangkat RT dan Kelurahan
- d. Tim sukses/kampanye calon legislatif/politikus
- e. Pengawas pemilu di tingkat kelurahan

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview): Dilakukan kepada warga, tokoh masyarakat, dan aktor politik lokal untuk menggali informasi mengenai bentuk, motif, dan persepsi terhadap politik uang.
- b. Observasi partisipatif: Peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati aktivitas sosial-politik warga menjelang dan saat pemilu.
- c. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen relevan seperti selebaran kampanye, laporan pengawasan pemilu, foto kegiatan kampanye, dan berita media lokal.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama:

- a. Reduksi data: Memilih data penting dan relevan dari hasil wawancara dan observasi.
- b. Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk naratif, matriks, atau tabel tematik.
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi: Menyimpulkan pola-pola yang ditemukan dan menghubungkannya dengan teori atau temuan sebelumnya.

5. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai pihak), triangulasi metode (menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member checking (konfirmasi ulang kepada narasumber mengenai keakuratan informasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di RT 23, Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu menunjukkan bahwa praktik politik uang merupakan fenomena yang terjadi secara nyata dan terstruktur dalam proses pemilu. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan beberapa temuan utama yang menggambarkan bagaimana politik uang dijalankan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bentuk dan Pola Politik Uang

Bentuk dan Pola Politik Uang adalah cara-cara yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih, pejabat, atau aktor politik lainnya dengan imbalan materi atau keuntungan tertentu. Praktik ini mencederai demokrasi karena merusak integritas pemilu dan proses politik. Berikut penjelasan lengkapnya:

a. Bentuk Politik Uang

Politik uang bisa muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

➤ Pembelian Suara (Vote Buying)

- Pemberian uang tunai, sembako, pulsa, atau barang lainnya kepada pemilih agar memilih calon tertentu.

- Umum terjadi menjelang hari pemungutan suara.

➤ Hadiah atau Bantuan Sosial Berbasis Kepentingan Politik

- Bantuan diberikan kepada kelompok tertentu (misalnya, kelompok tani atau keagamaan) dengan harapan mereka mendukung kandidat atau partai tertentu.

- Bisa berupa hibah alat, fasilitas umum, atau dana komunitas.

➤ Pemberian Jabatan atau Proyek

- Janji atau realisasi pemberian jabatan atau proyek kepada individu atau kelompok sebagai imbalan atas dukungan politik.

➤ Dana Kampanye Ilegal

- Dana yang digunakan untuk kampanye tanpa dilaporkan ke lembaga pengawas pemilu.

- Sering berasal dari pengusaha yang mengharapkan balas jasa setelah calon terpilih.

➤ Penyogokan untuk Memenangkan Pencalonan Internal Partai

- Calon menyuap pengurus partai agar dipilih sebagai kandidat dalam pilkada/pemilu.

b. Pola Politik Uang

Politik uang dijalankan dengan pola tertentu tergantung konteks sosial dan strategi pelaku:

➤ Langsung

- Calon atau tim sukses langsung membagikan uang atau barang kepada pemilih (door-to-door).

- Biasanya dilakukan secara diam-diam pada malam sebelum pencoblosan (sering disebut "serangan fajar").

➤ Melalui Perantara

- Menggunakan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, pemuka agama, atau ketua kelompok sebagai agen distribusi.

- Tujuannya adalah menciptakan kepercayaan dan pengaruh sosial.

➤ Transaksional

- Ada negosiasi antara pemberi dan penerima, misalnya: “Kalau saya dapat proyek, saya bantu kampanye.”

- Bisa juga antara elite partai dan penyumbang dana besar.

➤ Berkedok Kegiatan Sosial

- Kampanye disisipkan dalam acara keagamaan, bakti sosial, atau kegiatan komunitas.

- Bantuan diberikan dalam bentuk sumbangan amal, tapi sebenarnya untuk meraih simpati politik.

➤ Simbolik dan Jangka Panjang

- Bentuknya bisa berupa pembangunan fasilitas, beasiswa, atau pengangkatan pegawai.

- Tujuannya bukan hanya untuk pemilu saat itu, tapi juga membangun basis loyalitas politik.

c. Dampak Politik Uang

- Merusak demokrasi dan keadilan politik.

- Menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten atau korup.

- Membuat pemilih pragmatis dan apatis terhadap kualitas calon.

- Menyuburkan budaya korupsi setelah calon terpilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga dan tokoh masyarakat, praktik politik uang di RT 23 dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih, umumnya dilakukan pada malam menjelang hari pemilihan (serangan fajar).

- Pemberian bantuan berupa sembako, seperti beras, minyak goreng, dan mie instan, yang dikemas sebagai bentuk “bantuan sosial”.

- Penyaluran dana melalui tokoh masyarakat atau ketua RT, yang kemudian dibagikan kepada warga dengan iming-iming memilih calon tertentu.

- Acara sosial dengan hadiah, seperti jalan santai atau arisan warga, yang diam-diam disponsori oleh calon legislatif tertentu.

Pola-pola ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga melalui jaringan sosial yang kuat di lingkungan RT, sehingga memperkuat efektivitas pengaruhnya terhadap pilihan politik warga.

Motif dan Persepsi Masyarakat

Masyarakat tidak selalu pasif atau tertipu dalam praktik politik uang. Mereka sering punya alasan dan motif tertentu, seperti:

a. Motif Ekonomi

- Banyak warga yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit, sehingga bantuan berupa uang atau barang dianggap sebagai rezeki.

- Mereka memandang politik uang sebagai kesempatan sesaat untuk mendapatkan manfaat langsung.

b. Motif Pragmatis

Masyarakat berpikir, "Siapapun yang menang, hidup saya tetap begini," sehingga lebih memilih menerima uang atau barang sebagai keuntungan langsung daripada berharap pada janji politik yang belum pasti.

c. Motif Balas Budi

Jika bantuan datang dari calon yang pernah membantu secara pribadi atau kelompok, maka penerimaan uang dianggap sebagai bentuk balas jasa atau solidaritas sosial.

d. Motif Sosial dan Budaya

- Di beberapa daerah, pemberian uang atau barang dianggap bagian dari budaya timbal balik atau penghormatan terhadap tokoh masyarakat.
- Ada juga anggapan bahwa memberikan "uang transport" saat kampanye adalah hal yang wajar dan bukan suap.

Persepsi masyarakat bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan, pemahaman politik, dan pengalaman demokrasi.

a. Persepsi Politik Uang sebagai Hal Wajar

- Sebagian masyarakat menganggap politik uang adalah bagian tak terpisahkan dari pemilu.
- Mereka tidak melihatnya sebagai pelanggaran, tetapi sebagai "timbal balik" karena merasa tidak pernah mendapat manfaat dari negara atau wakil rakyat.

b. Persepsi Politik Uang sebagai Suatu Kecurangan

- Masyarakat yang lebih sadar hukum dan demokrasi cenderung menolak politik uang karena menyadari bahwa hal ini merusak integritas pemilu.
- Mereka melihatnya sebagai bentuk korupsi sejak dini.

c. Persepsi Ambivalen

- Ada yang tahu bahwa politik uang itu salah, tapi tetap menerimanya karena alasan pragmatis.
- Misalnya: "Saya terima uangnya, tapi belum tentu saya pilih orangnya."

d. Persepsi Terhadap Pelaku

- Calon yang memberi uang sering dilihat sebagai "dermawan" oleh masyarakat yang tidak memahami dampak jangka panjangnya.
- Namun, di beberapa komunitas, pelaku politik uang bisa kehilangan kepercayaan karena dianggap "membeli suara," bukan menunjukkan kualitas kepemimpinan.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan politik uang tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tapi juga perlu edukasi politik, penguatan ekonomi masyarakat, dan keteladanan dari para elite politik.

Sebagian besar warga yang menerima politik uang mengakui bahwa tindakan tersebut dilakukan karena alasan ekonomi. Dalam wawancara, beberapa warga menyatakan bahwa mereka merasa “sayang” jika tidak menerima uang atau bantuan yang dibagikan, terlepas dari apakah mereka akan memilih kandidat tersebut atau tidak.

Namun, terdapat juga warga yang menyatakan bahwa pemberian uang tersebut memengaruhi pilihan mereka, karena mereka merasa “berutang budi” atau terikat secara moral. Ini menunjukkan bahwa politik uang dapat menciptakan relasi timbal balik yang menguntungkan kandidat.

Selain itu, sebagian warga menganggap praktik politik uang sudah menjadi hal yang “biasa” dan sulit dihindari, karena dianggap bagian dari “strategi kampanye” yang tidak terlalu merugikan.

Faktor-Faktor Penyebab

Beberapa faktor yang mendorong maraknya praktik politik uang di RT 23 antara lain:

- Kondisi ekonomi masyarakat: Mayoritas warga RT 23 berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga mudah tergiur oleh pemberian material.
- Rendahnya literasi politik: Banyak warga yang belum memahami sepenuhnya pentingnya memilih berdasarkan visi dan program kandidat, bukan berdasarkan materi yang diterima.
- Lemahnya pengawasan pemilu di tingkat lokal: Pengawas pemilu tingkat kelurahan/kecamatan tidak memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mendeteksi dan menindak praktik politik uang yang bersifat terselubung.
- Budaya pragmatisme politik: Dalam konteks lokal, pemilu sering dipandang sebagai “musim rezeki”, sehingga terjadi toleransi terhadap praktik politik uang.

Dampak Politik Uang terhadap Demokrasi Lokal

Praktik politik uang berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi di RT 23, di antaranya:

- Melemahkan integritas pemilu, karena proses pemilihan tidak lagi berdasarkan pada kualitas atau kapabilitas kandidat, melainkan kemampuan finansial.
- Meningkatkan apatisme politik, terutama dari warga yang tidak menerima bantuan, karena mereka merasa terpinggirkan dalam proses demokrasi.
- Menciptakan ketimpangan akses politik, di mana calon dengan modal besar lebih diuntungkan dibandingkan kandidat yang memiliki program kerja tapi tidak punya kekuatan finansial.
- Meningkatkan peluang terjadinya korupsi pasca-terpilih, karena kandidat yang terpilih cenderung “mengembalikan modal” melalui praktik-praktik tidak etis.

Temuan ini sejalan dengan teori clientelism dan patronase politik, di mana hubungan antara pemilih dan kandidat lebih didasarkan pada pertukaran material ketimbang komitmen ideologis. Dalam konteks lokal seperti RT 23, hubungan sosial yang dekat antarwarga justru dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperkuat pengaruh mereka melalui jalur informal.

Dari sisi kebijakan, hal ini menunjukkan perlunya penguatan pendidikan politik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada politik uang. Selain itu, lembaga pengawas pemilu perlu diperkuat, baik dari segi kewenangan, sumber daya, maupun perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi fenomena yang nyata dan mengakar dalam pelaksanaan pemilu di RT 23, Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu. Politik uang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, sembako, hingga kegiatan sosial yang diselipkan dengan tujuan politis. Praktik ini tidak hanya melibatkan kandidat atau tim sukses, tetapi juga memanfaatkan jaringan sosial di tingkat lokal, termasuk tokoh masyarakat dan perangkat RT.

Faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang adalah kondisi ekonomi masyarakat yang relatif lemah, rendahnya tingkat literasi politik, lemahnya pengawasan pemilu di tingkat akar rumput, serta adanya budaya pragmatisme politik yang berkembang di kalangan pemilih. Warga cenderung melihat pemilu sebagai momentum untuk memperoleh keuntungan material, sementara pilihan politik tidak didasarkan pada program atau visi calon, melainkan pada siapa yang memberi lebih banyak.

Dampak dari praktik politik uang sangat merugikan proses demokrasi, karena menurunkan kualitas pemilu, membuka peluang terjadinya korupsi politik, serta menghambat munculnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Demokrasi lokal menjadi rentan terhadap manipulasi, dan partisipasi warga kehilangan makna substantif.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang serius dan berkelanjutan dalam bentuk edukasi politik masyarakat, penguatan ekonomi warga, serta peningkatan kapasitas dan efektivitas lembaga pengawasan pemilu. Hanya dengan demikian, praktik politik uang dapat dikurangi dan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat dapat terwujud di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu Republik Indonesia, 2020. Politik Uang dan Tantangan Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: Bawaslu RI), hlm. 12.
- Burhanuddin Muhtadi, 2019. Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Indonesia (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 45–47.
- Lexy J. Moleong, 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 6–10.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, edisi ke-3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications), hlm. 31–33.
- “Praktik Politik Uang Marak di Bengkulu, RT 23 Dusun Besar Jadi Sorotan,” Radar Bengkulu, 14 April 2019, <https://radarbengkulu.co.id/politik-uang-rt23>.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta), hlm. 372–375.